

Peran Komunikasi Pembangunan Dialogis Terhadap Pemanfaatan Hasil Pembangunan Yang Belum Merata Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

The Role Of Dialogic Development Communication In Addressing Unequal Utilization of Development Outcomes For Sustainable Development Goals

Oktavia Dwi Ardiana¹, Dinda Azzahra², Hana Humaira Sachmaso³, Khairunnisa Putri Harsanti⁴, Syana Mifta Salsabila⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 09, 2024

Revised September 15, 2024

Accepted September 23, 2024

Available online 07 Oktober, 2024

Kata Kunci:

dialogic development communication, utilization of development results, sustainable development.

Keywords:

komunikasi pembangunan dialogis, pemanfaatan hasil pembangunan, pembangunan berkelanjutan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur yang merata merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Namun, di beberapa daerah seperti Lampung, masih terdapat kesenjangan dalam pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran komunikasi pembangunan dialogis dalam memaksimalkan pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur yang belum merata di Lampung, serta bagaimana implementasi hasil pembangunan tersebut dapat mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Dengan menggunakan metode studi pustaka, artikel ini mengeksplorasi dua pertanyaan utama yaitu bagaimana peran komunikasi dialogis dalam memastikan partisipasi masyarakat dan pemerintah lokal dalam pemanfaatan infrastruktur dan bagaimana hasil pembangunan infrastruktur yang telah ada di Lampung dapat diimplementasikan secara lebih merata untuk mendukung pencapaian SDGs. Berdasarkan hasil analisis, komunikasi dialogis berperan sebagai medium yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan ide antara pihak yang terlibat, sehingga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan infrastruktur. Lebih jauh, implementasi yang partisipatif dinilai sebagai langkah kunci dalam mengatasi tantangan ketimpangan pembangunan, memperkuat inklusi sosial, dan mengoptimalkan manfaat pembangunan untuk semua kelompok masyarakat.

ABSTRACT

The equitable development of infrastructure is a crucial aspect for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). However, in certain regions such as Lampung, inequalities still exist in the utilization of infrastructure development outcomes. This article aims to analyze the role of dialogic development communication in maximizing the utilization of uneven infrastructure development in Lampung, as well as how the implementation of these development outcomes can support the achievement of sustainable development. Using a literature review method, the article explores two key questions: how the role of dialogic communication ensures the participation of local communities and governments in the utilization of infrastructure, and how the existing infrastructure in Lampung can be more evenly implemented to support SDG achievement. Based on the analysis, dialogic communication serves as a medium that enables the exchange of information and ideas among stakeholders, thereby enhancing community involvement in decision-making related to infrastructure use. Furthermore, participatory implementation is considered a key step in addressing development inequality, strengthening social inclusion, and optimizing the benefits of development for all societal groups.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan wujud nyata pembangunan berkelanjutan sekaligus cerminan tekad masyarakat untuk berkontribusi maksimal melalui gabungan berbagai proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan demi mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Proses ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok, meningkatkan standar hidup, serta memperluas kesempatan dalam berperan dalam ekonomi dan sosial baik bagi individu maupun

*Corresponding author

E-mail addresses: 2210611162@mahasiswa.upnvi.ac.id¹, 2210611173@mahasiswa.upnvi.ac.id²,

2210611187@mahasiswa.upnvi.ac.id³, 2210611190@mahasiswa.upnvi.ac.id⁴, 2210611196@mahasiswa.upnvi.ac.id⁵

masyarakat secara keseluruhan (Todaro dan Smith, 2006).¹

Infrastruktur merupakan hasil dari pengembangan fasilitas yang diharapkan atau dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung tujuan ekonomi dan sosial. Infrastruktur memainkan peran vital sebagai roda penggerak dalam pertumbuhan pembangunan dan perekonomian. Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang mencakup transportasi, irigasi, drainase, bangunan, dan fasilitas publik lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam konteks sosial dan ekonomi. Infrastruktur menjadi tulang punggung yang mendukung berjalannya sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Infrastruktur ini bisa didefinisikan sebagai fasilitas dasar, peralatan, serta instalasi yang dibangun untuk memastikan kelancaran fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam masyarakat.² Pembangunan infrastruktur mempermudah proses perubahan menuju kemajuan yang lebih baik. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan yang berfungsi sebagai faktor pendukung utama dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Pembangunan jalan memegang peran krusial dalam memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Namun, ketimpangan seringkali terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan sering kali terjadi di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Lampung. Pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung menunjukkan ketidakmerataan yang signifikan. Di satu sisi, sejumlah wilayah menikmati kemajuan pesat dalam pengembangan jalannya, sementara daerah lain masih terhambat oleh minimnya akses jalan yang layak. Kondisi ini memicu kesenjangan sosial dan ekonomi di antara wilayah-wilayah tersebut, serta menyulitkan akses terhadap fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.⁴

Kerusakan jalan di Lampung disebabkan oleh konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi, kendaraan bermuatan berlebih, dan drainase yang buruk. Menurut pengamat Djoko Setijowarno, kerusakan ini juga dipengaruhi kurangnya perhatian pemerintah, dengan APBD Lampung sebesar Rp 7,38 triliun, namun hanya 1% dialokasikan untuk pemeliharaan jalan dan irigasi. Berdasarkan data Kementerian PUPR 2021, jalan nasional di Lampung memiliki kondisi baik sebesar 32,28%, sedangkan jalan provinsi sebesar 64,45%. Namun, jalan kabupaten memiliki persentase kerusakan yang signifikan, dengan kondisi rusak mencapai 44,83% atau 6.677 km.

Secara nasional, kerusakan jalan daerah mencapai 52%, yang menunjukkan kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memelihara infrastruktur jalan. Selain itu, truk *Over Dimension Over Loading* (ODOL) yang melintas hampir 100% berkontribusi pada kerusakan, namun upaya penerapan kebijakan zero ODOL ditolak oleh Kementerian Perindustrian dan Apindo. Jalan rusak di Lampung mencakup 23,15% dari total jalan provinsi, dengan 256,471 km mengalami kerusakan berat. Namun dalam pembangunan infrastruktur, negara mempunyai tantangan seperti biaya yang mahal, dampak lingkungan, serta kesenjangan akses antar daerah masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dan perencanaan yang matang agar pembangunan infrastruktur dapat berlangsung secara berkelanjutan dan merata bagi semua wilayah.⁵

Dalam proses pembangunan, keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat penting agar tidak muncul kesalahpahaman yang dapat berujung pada kecurigaan dan penolakan terhadap program pembangunan. Untuk mencegah hal ini, semua program serta hasil pembangunan perlu disampaikan dengan jelas, menggunakan berbagai sarana pendukung dan mempertimbangkan kultur setempat. Keberhasilan pembangunan dimulai dari adanya komunikasi yang efektif. Komunikasi berperan penting dalam menjalankan pembangunan. Maka dari itu, model komunikasi pembangunan akan berperan penting dalam tujuan pembangunan infrastruktur ini. Model komunikasi yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah komunikasi dialogis, yang merupakan bagian dari model komunikasi partisipatif.⁶

Komunikasi dialogis yang merupakan bagian dari model komunikasi interaktif, dalam menyampaikan pesannya tidak disampaikan melalui saluran formal, melainkan menggunakan saluran informal yang dibentuk secara swadaya dan swakelola oleh masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya model komunikasi dialogis ini masyarakat sebagai partisipan saling bertukar pandangan untuk

¹ Warsilan, W., & Noor, A. (2015). *Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda*. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 31 No.2, Hal. 359

² Warsilan, W., & Noor, A. *Ibid.* Hal 361

³ Anggraeni, F. A. (2022). *Analisis Peran Pemerintah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pajak Penerangan Jalan Bagi Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, Vol. 2 No.(2). <https://doi.org/10.55606/jebaku.v2i3.430>

⁴ Alvian Fajar. (2023, June 13). Ketidakmerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Provinsi Lampung terhadap Pertumbuhan Ekonomi-Kompasiana.com.KOMPASIANA. diakses pada 06/10/2024 <https://www.kompasiana.com/alvianfajarandihapsorojati/6487f60108a8b57a603fe2f3/ketidakterataan-pembangunan-infrastruktur-jalan-di-provinsi-lampung-terhadap-pertumbuhan-ekonomi>

⁵ Alvian Fajar. *Ibid.* (2023, June 13).

⁶ Qadir, A., & Khumaedi, T. (2022). Model Komunikasi Pembangunan dalam Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung. At TAWASUL: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Vol. 2 No.1, Hal 45.

menyampaikan argumen mereka dalam merumuskan rencana pembangunan. Melalui komunikasi dialogis, masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga menjadi pengirim pesan. Dengan kata lain, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga berperan sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan tersebut.⁷

Komunikasi dialogis dapat mendorong masyarakat untuk menjadi mandiri, dengan menggunakan dorongan yang diberikan serta memperoleh kemudahan dalam mengakses bermacam layanan seperti infrastruktur, kesehatan, pembelajaran, serta pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan adanya komunikasi dialogis yang merupakan komunikasi 2 arah, akan memberikan manfaat untuk kedua belah pihak. Partisipan dapat mengeluarkan keluh kesahnya serta bertanya dengan bebas kepada penyelenggara, sedangkan penyelenggara dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi keluh kesah partisipan dan akan merumuskan solusi sebagai bentuk penyelesaian dari keluh-kesah dari para partisipan tersebut.⁸ Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari komunikasi pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat demi tujuan pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka sebagai pendekatan utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Melalui tinjauan sistematis terhadap berbagai literatur yang relevan, termasuk jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian terkait, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi, mensintesis, dan mengkritisi temuan-temuan yang ada. Proses ini melibatkan pemilihan sumber-sumber berdasarkan kriteria tertentu, seperti relevansi topik, metode penelitian yang digunakan, serta keandalan dan kredibilitas data.

Dengan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tren, serta kesenjangan dalam studi yang sudah ada terkait komunikasi pembangunan dialogis dan pemanfaatan hasil pembangunan yang belum merata. Hal ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai hubungan antara praktik komunikasi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hasil dari tinjauan literatur ini akan digunakan sebagai landasan untuk menyusun argumen, mendukung hipotesis, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi kebijakan pembangunan di masa depan.

TINJAUAN TEORI

Teori ketergantungan merupakan salah satu teori kritis dalam studi pembangunan yang menyoroti bagaimana negara-negara berkembang seringkali terjebak dalam kondisi ketergantungan pada negara-negara maju, terutama dalam hal ekonomi, teknologi, dan kebijakan. Teori ini menekankan bahwa pembangunan di negara-negara berkembang tidak terjadi secara mandiri, melainkan dipengaruhi oleh hubungan asimetris dengan negara-negara maju yang mendominasi perekonomian global. Dalam konteks komunikasi pembangunan dan perubahan sosial, teori ketergantungan sangat relevan karena menjelaskan bagaimana negara-negara maju seringkali mempengaruhi negara-negara berkembang dalam hal ekonomi, politik, dan budaya, sehingga menghambat proses pembangunan yang berkelanjutan di negara-negara tersebut.

Tokoh utama dari teori ketergantungan yaitu Theotonio Dos Santos, Andre Gunder Frank, dan Paul Baran. Theotonio Dos Santos mendefinisikan bahwa ketergantungan merupakan hubungan relasional yang tidak seimbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua kelompok negara tersebut. Andre Gunder Frank adalah seorang ekonom dan sosiolog yang berperan penting dalam pengembangan teori ketergantungan. Ia menyebarkan teori ini di Amerika Utara pada akhir tahun 1960-an. Frank berpendapat bahwa kapitalisme global akan membuat ketergantungan masa lalu dan sekarang, sehingga negara-negara yang tidak maju harus memutuskan hubungan dengan negara-negara maju untuk dapat maju.⁹

Dalam konteks pembangunan di Lampung, teori ketergantungan dapat digunakan untuk menjelaskan ketidakmerataan hasil pembangunan, khususnya dalam sektor infrastruktur. Ketergantungan ini tidak hanya terjadi pada skala global, tetapi juga tercermin di dalam negeri, di mana daerah-daerah pinggiran seperti Lampung cenderung tergantung pada pusat kekuasaan yang mengontrol sumber daya dan alokasi pembangunan. Ketidakmerataan ini dapat dipahami melalui analisis

⁷ Qadir, A., & Khumaedi, T. *Ibid.* Hal 47.

⁸ Fatika, A., & Nusantara, W. (2021). Penerapan Komunikasi Dialogis Pendamping Masyarakat Program PKH di Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua, Vol. 5 No.1, Hal. 41

⁹ Nasir, B. (2021). *Teori-teori pembangunan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. <https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/20534/Diktat%25Teori%20Teori%20Pembangunan.docx?sequence=1&isAllowed=y>

ketergantungan fiskal yang menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah di Lampung tergolong rendah, terutama pada daerah otonomi baru yang terbentuk setelah 1999.¹⁰

Pengambilan keputusan yang terpusat sering kali mengabaikan kebutuhan spesifik daerah pinggiran, yang menyebabkan daerah-daerah seperti Lampung kurang mendapatkan perhatian dan alokasi yang adil dalam pembangunan infrastruktur. Akibatnya, meskipun ada kemajuan dalam pembangunan di tingkat nasional, daerah-daerah tertentu tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan hasil pembangunan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Misalnya, daerah-daerah seperti Lampung Tengah dan Lampung Selatan, meskipun memiliki potensi ekonomi yang signifikan, tetap menghadapi tantangan dalam mendapatkan dukungan infrastruktur yang memadai. Ketergantungan pada sektor primer, seperti pertanian, juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merata dan sering kali tidak sejalan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh wilayah.¹¹

Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, penting bagi komunikasi pembangunan dialogis untuk berperan aktif dalam mengatasi ketidakmerataan ini. Melalui dialog yang inklusif dan partisipatif, suara masyarakat di daerah pinggiran dapat didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Hal ini akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil dan merata dalam distribusi hasil pembangunan serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Komunikasi Dialogis Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Secara etimologis, komunikasi dialogis merujuk pada tindakan saling bertukar pesan dengan tujuan mencapai konsensus makna. Hal ini melibatkan proses pesan disampaikan, diterima, dan kemudian ditafsirkan secara bergantian. Komunikasi dialogis dapat didefinisikan sebagai percakapan yang bersifat timbal balik dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak. Komunikasi ini bersifat terbuka dan komunikatif serta menjunjung tinggi kesetaraan dan saling menghormati yang membuat bentuk komunikasi ini sangat etis. Maka dari itu, penerapan komunikasi dialogis dalam manajemen diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan dan kerja sama.¹³ Selain itu, komunikasi dialogis juga dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan dan meningkatkan citra suatu kelompok kerja seperti organisasi atau pemerintah.¹⁴

Pembentukan suatu dialog tidak memiliki batasan ruang dan waktu sehingga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja selama hal tersebut dilaksanakan oleh dua individu atau lebih serta secara dua arah. Oleh karena itu, dialog dalam media online juga dapat dijadikan media untuk melakukan komunikasi dialogis. Dialog di media online memungkinkan audiens untuk memberikan umpan balik tentang memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menanggapi kekhawatiran publik dan menerima masukan dari publik. Interaktivitas media online dapat memfasilitasi kualitas percakapan antara organisasi-publik dan menghasilkan hasil yang positif seperti peningkatan kepercayaan, pengetahuan program dengan lebih baik, dan peningkatan manfaat.¹⁵

Era digital telah membawa angin segar dalam dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Penggunaan media sosial oleh pemerintah bukan sekadar tren, melainkan sebuah transformasi fundamental dalam cara negara menjalankan pemerintahan. Dengan adanya media sosial, pemerintah kini memiliki saluran komunikasi yang lebih langsung, interaktif, dan inklusif. Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi kinerja pemerintah. Transparansi yang meningkat serta layanan publik yang lebih responsif menjadi buah manis dari pemanfaatan media sosial ini, sehingga secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.¹⁶

Komunikasi dialogis menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan model komunikasi linier. Sebagai bagian dari model komunikasi interaktif, komunikasi dialogis tidak mengandalkan saluran formal dalam penyampaian pesan, melainkan memanfaatkan jalur informal yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat, khususnya di lingkungan pedesaan. Dalam konteks

¹⁰ KURNIAWAN, A. E. (2022). *ANALISIS KETERGANTUNGAN FISKAL KABUPATEN/KOTA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).

¹¹ Bappenas. (2015). *Analisis Provinsi Lampung*. https://simreg.bappenas.go.id/assets/temaalus/document/Publikasi/DokPub/Analisis%20Provinsi%20Lampung%202015_ok.pdf

¹² Farida, I. (2017). Identifikasi pusat pertumbuhan dan interaksi spasial di Provinsi Lampung.

¹³ Heri Ismanto, Rian Antony, & Carolus B. M., 2024, Pengalaman Komunikasi Dialogis Para Guru dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan, *Jurnal Bahasa, Seni, dan Pengajaran*, Vol. 8, No 1, hal 18- 26.

¹⁴ Augustine Pang, Wonsun Shin, Zijian Lew, Joseph B. Walther, 2018, Building Relationships Through Dialogic Communication: Organizations, Stakeholders, And Computer-Mediated Communication, *Journal of Marketing Communications*. 24, (1), 68-82..

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Andhini Hastrida & Hendriyani, (2023), Pengaruh Komunikasi Dialogis Terhadap Kepercayaan Pada Pemerintah, *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*.

pelaksanaan program untuk membenahi infrastruktur pada kasus Lampung, komunikasi ini membuka ruang bagi partisipan untuk saling bertukar gagasan, berdiskusi, dan menyampaikan argumen masing-masing dalam merumuskan rencana pembangunan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya menjadi penerima informasi secara pasif, tetapi juga berperan aktif sebagai pengirim pesan. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya dianggap sebagai objek pembangunan yang menerima keputusan dari pihak luar, tetapi mereka juga menjadi subjek yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Peran aktif ini memperkuat posisi masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan, yang memiliki suara dan kontribusi dalam menentukan arah perkembangan wilayah mereka.¹⁷

Penerapan komunikasi dialogis akan membuka peluang untuk mempromosikan keterlibatan yang lebih inklusif dan partisipatif. Masyarakat diberdayakan untuk ikut serta dalam proses pembangunan, memberikan masukan yang relevan, serta berkolaborasi dengan pihak lain untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Alhasil, pembangunan yang dihasilkan melalui pendekatan ini lebih responsif terhadap realitas dan aspirasi masyarakat setempat, serta mencerminkan semangat gotong royong dan swadaya yang menjadi ciri khas masyarakat desa. Komunikasi dialogis menciptakan ruang publik virtual yang inklusif, di mana setiap suara didengar dan dihargai. Dalam ruang ini, tidak ada hierarki yang kaku atau batasan yang membatasi. Semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berbagi perspektif, mengajukan pertanyaan, dan mencari solusi bersama. Suasana yang kondusif dan saling menghormati menjadi fondasi bagi terciptanya dialog berkualitas yang pada akhirnya akan memperkaya pemahaman kita tentang dunia dan sesama.

Apabila kita amati, kasus jalanan rusak di Lampung mendapat perhatian dari pemerintah setempat bahkan presiden karena penggunaan komunikasi dialogis dalam media online. Keadaan jalanan tersebut awalnya diunggah di akun TikTok pada bulan Maret 2023 oleh warga Lampung yang mengkritisi jalanan rusak di Lampung yang tak kunjung diperbaiki dan kemudian viral di berbagai media sosial. Setelah kasus tersebut viral, banyak masyarakat yang memberikan simpati dan memohon bagi pemerintah setempat Lampung untuk segera memperbaiki jalan tersebut. Hingga akhirnya hal tersebut berhasil menarik perhatian presiden pada saat itu yaitu Joko Widodo sehingga beliau mendatangi tempat tersebut pada bulan Mei 2023. Kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung menjadi katalisator percepatan perbaikan infrastruktur jalan. Gubernur Lampung yang tadinya santai, langsung bergerak cepat memperbaiki jalan-jalan rusak yang sudah lama dikeluhkan warga.¹⁸

Implementasi Pemanfaatan Hasil Pembangunan dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan

Saat ini, pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan menjadi topik yang sangat penting guna mensejahterakan rakyat dan kemajuan suatu negara. Pembangunan didefinisikan sebagai suatu upaya yang dirancang secara sistematis oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Dalam proses pembangunan bukan hanya untuk menciptakan perbaikan ekonomi, namun juga untuk memfasilitasi kesejahteraan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencapai aspirasi mereka.¹⁹ Maka dari itu, pemerintah harus memastikan pembangunan yang merata, sehingga di daerah terpencil mendapatkan infrastruktur yang layak seperti di kota besar.

Kesadaran mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam, mengurangi eksploitasi sumber daya, dan memperhatikan dampak jangka panjang dari pembangunan menjadi suatu hal yang mendesak untuk disosialisasikan kepada masyarakat untuk dapat diimplementasikan secara nyata. Tujuan akan sosialisasi ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem guna keberlangsungan kehidupan yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah setempat harus dengan bijak membuat program-program pembangunan, supaya dapat merata pembangunannya ke daerah-daerah yang terpencil.²⁰

Pembangunan berkelanjutan merupakan penjabaran dua elemen utama yang penting yaitu pembangunan yang bertujuan untuk selalu mengembangkan potensi menuju kondisi yang lebih baik, sedangkan berkelanjutan yang mewakili makna ketahanan dan kelestarian.²¹ Maka dari itu, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya manusia untuk terus meningkatkan kualitas hidupnya, dengan tetap memperhatikan segala aspek-aspek pembangunannya. Dalam prosesnya, pembangunan

¹⁷ Qadir, A., & Khumaedi, T. (2022). MODEL KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KELEMBAGAAN KAMPUNG. *AT-TAWASUL*, 2(1), hal 48

¹⁸ Danu Damarjat, (2023), Apa Kabar Jalan Rusak Lampung Tengah bak Kubangan yang Viral Maret Lalu? *detikNews*, <https://news.detik.com/berita/d-6865237/apa-kabar-jalan-rusak-lampung-tengah-bak-kubangan-yang-viral-maret-lalu>

¹⁹ Hariyanto, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24-29.

²⁰ Rahadian, A. H. (2016, February). Strategi pembangunan berkelanjutan. In *Prosiding Seminar STIAMI* (Vol. 3, No. 1, pp. 46-56). hal. 48.

²¹ Cristian, D., Maria, L., Artene, A., & Duran, V. (2015). The components of sustainable development - a possible approach. *Procedia Economics and Finance*, 26(15), 806-811. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00849-7](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00849-7).

berkelanjutan berfokus pada berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang di mana ketiga aspek tersebut harus terus berkembang secara beriringan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk mencukupi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya pembangunan berkelanjutan ditujukan sebagai pemerataan pembangunan antar generasi yaitu pada masa kini hingga masa mendatang.²²

Pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang, diperlukan strategi pembangunan yang seimbang dan menyeluruh antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Mengimplementasikan strategi ini harus disusun dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak akan mengorbankan kesejahteraan sosial maupun kelestarian lingkungan sekitar. Selain itu, adanya aspek kelembagaan yang bijak, efektif, dan transparan juga akan menjadi peran yang penting dalam mendukung implementasi strategi tersebut.²³

Implementasi merupakan proses pelaksanaan dari kebijakan atau program yang telah dirancang yang berkaitan dengan desentralisasi pembangunan, yang memiliki tujuan utamanya untuk menciptakan pemerataan hasil pembangunan di seluruh lapisan masyarakat.²⁴ Sehingga, desentralisasi memiliki peran yang lebih besar dalam tahap pembangunan. Pembangunan yang efektif tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat saja, tetapi harus adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dengan mengandalkan kemampuan masyarakat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, maka semakin besar potensi keberhasilan pembangunan dapat tercapai. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi berperan untuk menentukan arah pembangunannya.

Terkait kasus jalan rusak di Lampung sangat penting untuk diperhatikan terkait dengan mengimplementasikan pemanfaatan hasil pembangunan berkelanjutan, sebab infrastruktur seperti jalan menjadi pemegang peranan yang cukup krusial dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan yang berkualitas dan berkelanjutan akan berperan sebagai pendorong peningkatan mobilitas, aksesibilitas, serta pengembangan ekonomi lokal maupun regional. Namun, jika fasilitas atau infrastruktur seperti jalan tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada terhambatnya berbagai sektor pembangunan yang ada. Sehingga, akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).²⁵

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam kasus jalan rusak di Lampung, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam implementasi pemanfaatan hasil pembangunan. Pertama, perbaikan dan pemeliharaan jalan rusak yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat, harus dilakukan dengan secara menyeluruh dan berkelanjutan yaitu dengan memakai kualitas material dan teknik konstruksi yang digunakan harus sesuai dengan standar yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Tidak hanya itu, perlu adanya strategi perawatan yang rutin dan teratur, supaya jalan yang sudah dibangun tidak cepat mengalami kerusakan kembali. Kedua, dalam kasus ini harus adanya keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif, yang dimulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian.²⁶ Selain itu, keterlibatkan masyarakat ini sebagai pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur supaya masyarakat memiliki rasa tanggung jawab untuk memelihara infrastruktur di wilayah mereka.

Pada pemanfaatan hasil pembangunan yang baik dan maksimal akan mendukung akses ekonomi dan sosial masyarakat Lampung. Sehingga, jika jalan diperbaiki dengan baik dan dipelihara secara intensif serta berkelanjutan, maka seluruh akses seperti akses ke pasar, pendidikan, pelayanan kesehatan serta akses kendaraan pembawa sumber daya akan semakin mudah. Hal ini, berperan sebagai pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pembangunan yang merata, dan akan tercapainya cita-cita pembangunan berkelanjutan lainnya, sebab jika infrastruktur belum merata, maka akan menjadi suatu kendala tersendiri bagi pertumbuhan pada daerah tersebut.²⁷ Dengan demikian, perbaikan infrastruktur

²² *Ibid.*

²³ Pratiwi, N., Santosa, D. B., & Ashar, K. (2018). Analisis implementasi pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 18(1), 1-13. hal. 3

²⁴ Gugut, Y., & AS, M. R. (2019). IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA PASCA SOSIALISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(4), 265-271. Pratiwi, N., Santosa, D. B., & Ashar, K. (2018). Analisis implementasi pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 18(1), 1-13. hal. 3

²⁵ Saputri, W., Andryan, W., & Khodijah, D. P. I. (2021). PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SDGs 2030; Zero Hunger (Goal 2). *Ilmu Kelautan dan Perikanan*, June, 4-14.

²⁶ Rahman, A., & Rosmita, R. PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA GEMILANG KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 1(2), 57-75.

²⁷ Kusuma, M. E., & Muta'ali, L. (2019). Hubungan pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi wilayah Indonesia. *Jurnal Bumi Indonesia*, 8(3).

jalan rusak di Lampung akan menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang adil dan merata.

Selain memperbaiki jalan yang rusak dengan menggunakan material yang berkualitas serta memeliharanya secara intensif dan berkelanjutan, salah satu langkah terhadap implementasi hasil pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan melalui pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Mengimplementasikan teknologi berkelanjutan dalam infrastruktur berkaitan dengan pengurangan emisi karbon, efisiensi energi yang lebih tinggi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan, manfaat dari teknologi ramah lingkungan dapat menjadi investasi yang sangat berharga dengan memberikan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Pemerintah dapat melakukan pembangunan menggunakan energi terbarukan pada pembangunan proyek besar seperti LRT, MRT, dan bus listrik untuk mengurangi emisi karbon. Tidak hanya itu, pemerintah juga dapat membangun fasilitas pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah yang belum merata pembangunannya dengan menggunakan energi yang ramah lingkungan seperti menggunakan panel surya pada atap bangunan, menggunakan sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC) yang hemat energi, dan menggunakan teknologi *smart building* yang dapat memonitor dan mengoptimalkan penggunaan energi.²⁸

SIMPULAN

Pentingnya penerapan komunikasi dialogis dalam berbagai konteks, khususnya dalam manajemen dan pemerintahan. Komunikasi dialogis, yang berfokus pada pertukaran pesan yang terbuka, interaktif, dan setara, dapat meningkatkan kualitas keputusan dan kerja sama, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penggunaan media online memperkuat komunikasi dialogis dengan memungkinkan umpan balik langsung dari masyarakat, seperti yang ditunjukkan dalam kasus perbaikan jalan rusak di Lampung yang mendapat perhatian nasional melalui viralnya kritik warga di media sosial. Penerapan komunikasi dialogis di media digital membuka peluang untuk partisipasi publik yang lebih luas, meningkatkan transparansi, dan mendorong solusi yang lebih inklusif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial serta pelestarian lingkungan. Pemerintah berperan penting dalam memastikan pembangunan merata, terutama di daerah terpencil, dengan infrastruktur yang layak. Partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Kasus jalan rusak di Lampung menunjukkan bahwa infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung akses ekonomi dan sosial. Pembangunan dan pemeliharaan jalan yang berkualitas dan berkelanjutan akan mendorong peningkatan mobilitas dan aksesibilitas, yang pada akhirnya mendukung pengentasan kemiskinan, pembangunan yang merata, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Kemudian implementasi pembangunan yang ramah lingkungan seperti penggunaan teknologi berkelanjutan dalam infrastruktur, termasuk energi terbarukan, berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan efisiensi energi. Hal ini akan mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan yang lebih luas, yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan yang adil dan merata harus terus diupayakan melalui perencanaan yang matang, pemeliharaan infrastruktur yang baik, serta penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

REFERENSI

- Anggraeni, F. A. (2022). Analisis Peran Pemerintah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pajak Penerangan Jalan Bagi Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 2 No.(2). <https://doi.org/10.55606/jebaku.v2i3.430>
- Bappenas. (2015). *Analisis Provinsi Lampung*. https://simreg.bappenas.go.id/assets/temaalus/document/Publikasi/DokPub/Analisis%20Provinsi%20Lampung%202015_ok.pdf
- Cristian, D., Maria, L., Artene, A., & Duran, V. (2015). The components of sustainable development - a possible approach. *Procedia Economics and Finance*, 26(15), 806-811. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00849-7](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00849-7).

²⁸ Khalidy, F., Saifudin, F., Yanti, W., Bangki, R., & Mualim, I. (2024). Revolusi Hijau dalam Pembangunan: Integrasi Teknologi Ramah Lingkungan dalam Proyek Infrastruktur. *Kerja Praktek Teknik Lingkungan*, 1(1), 46-52.

- Damarjat, D. (2023). Apa Kabar Jalan Rusak Lampung Tengah bak Kubangan yang Viral Maret Lalu? detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6865237/apa-kabar-jalan-rusak-lampung-tengah-bak-kubangan-yang-viral-maret-lalu>
- Farida, I. (2017). Identifikasi pusat pertumbuhan dan interaksi spasial di Provinsi Lampung.
- KURNIAWAN, A. E. (2022). *Analisis Ketergantungan Fiskal Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Daerah Di Provinsi Lampung* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).
- Fatika, A., & Nusantara, W. (2021). Penerapan Komunikasi Dialogis Pendamping Masyarakat Program PKH di Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua, Vol. 5 No.1
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24-29.
- Hastrida, A. & Hendriyani, (2023), Pengaruh Komunikasi Dialogis Terhadap Kepercayaan Pada Pemerintah, *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*.
- Ismanto, Heri., Antony, Rian., & Mulyatno C. B. 2024. *Pengalaman Komunikasi Dialogis Para Guru dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan*. *Jurnal Bahasa, Seni, dan Pengajaran*, Vol. 8, No 1, hal 18-26.
- Khalidy, F., Saifudin, F., Yanti, W., Bangki, R., & Mualim, I. (2024). Revolusi Hijau dalam Pembangunan: Integrasi Teknologi Ramah Lingkungan dalam Proyek Infrastruktur. *Kerja Praktek Teknik Lingkungan*, 1(1), 46-52.
- Kusuma, M. E., & Muta'ali, L. (2019). Hubungan pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi wilayah Indonesia. *Jurnal Bumi Indonesia*, 8(3).
- Nasir, B. (2021). *Teori-teori pembangunan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. <https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/20534/Diktat%25Teori%20Teori%20Pembangunan.docx?sequence=1&isAllowed=y>
- Pang, Augustine., Shin, Wonsun., Lew, Zijian., and Walther, Joseph B. (2018). Building Relationships Through Dialogic Communication: Organizations, Stakeholders, And Computer-Mediated Communication. *Journal Of Marketing Communications*. 24, (1), 68-82.
- Pratiwi, N., Santosa, D. B., & Ashar, K. (2018). Analisis implementasi pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 18(1), 1-13. hal. 3
- Qadir, A., & Khumaedi, T. (2022). Model Komunikasi Pembangunan dalam Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung. At TAWASUL: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Vol. 2 No.1.
- Rahadian, A. H. (2016, February). Strategi pembangunan berkelanjutan. In *Prosiding Seminar STIAMI* (Vol. 3, No. 1, pp. 46-56). hal. 48.
- Rahman, A., & Rosmita, R. PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA GEMILANG KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 1(2), 57-75.
- Saputri, W., Andryan, W., & Khodijah, D. P. I. (2021). PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SDGs 2030; Zero Hunger (Goal2). *Ilmu Kelautan dan Perikanan*, June, 4-14.
- Warsilan, W., & Noor, A. (2015). Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 31 No.2